



Perencanaan Partisipatif Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Dangara'a Kecamatan Pinembani Kabupaten Sigi

Community Participatory Planning in Development in Dangara'a Village, Pinembani District, Sigi Regency

M. Syukur*

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Palu, syukurpacoppori79@gmail.com

*Corresponding Author: E-mail: syukurpacoppori79@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 28 Nov, 2024

Revised: 7 Dec, 2024

Accepted: 19 Dec, 2024

Kata Kunci:

Partisipasif;
Masyarakat;
Pembangunan

Keywords:

Participatory;
Community;
Development

DOI: 10.56338/jks.v7i12.6592

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perencanaan partisipatif dalam pembangunan di Desa Dangara'a Kecamatan Pinembani Kabupaten Sigi. Dasar penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dan tipe penelitiannya adalah deskriptif. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data, dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik penarikan informan menggunakan *purposive*. Analisis data yang digunakan yaitu model interaktif dalam analisis data, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah teori Ericson yang terdiri dari tiga aspek, yaitu partisipasi dalam tahap perencanaan, partisipasi dalam tahap pelaksanaan dan partisipasi dalam pemanfaatan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat yang ada di Desa Dangara'a masih sangat rendah, khususnya pada tahap musrenbang desa. Faktor penyebab sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, karena usulan dan masukan yang disampaikan masyarakat banyak yang belum terealisasi, sehingga pada tahap pelaksanaan pembangunan, banyak yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Selain itu, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga infrastruktur yang sudah ada, karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya memelihara infrastruktur/program hasil pembangunan. Sementara itu, masyarakat belum memiliki kesadaran untuk menggunakan program hasil pembangunan sebagaimana mestinya, yaitu sesuai dengan manfaatnya

ABSTRACT

This study aims to examine participatory planning in development in Dangara'a Village, Pinembani District, Sigi Regency. The basis of the research used is qualitative and the type of research is descriptive. The type of data uses primary data and secondary data. Data collection techniques are carried out through observation, interviews and documentation. The technique of drawing informants uses purposive. Data analysis used is an interactive model in data analysis, which consists of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The theory used is Ericson's theory which consists of three aspects, namely participation in the planning stage, participation in the implementation stage and participation in utilization. Based on the results of the research conducted, it was concluded that community participation in Dangara'a Village is still very low, especially at the village musrenbang stage. The causal factor so that the community does not participate in the implementation of development planning meetings, because many of the proposals and input submitted by the community have not been realized, so that at the development implementation stage, many are not in accordance with the wishes of the community and cause public distrust. In addition, public awareness is still low to maintain existing infrastructure, due to the lack of public understanding of the importance of maintaining infrastructure/development program results. Meanwhile, the community does not yet have the awareness to use the results of development programs as they should be, namely according to their benefits.

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah merupakan usaha yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Terlebih dengan diterapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015, tentang Pemerintahan Daerah, yang berintikan penyelenggaraan otonomi daerah didasarkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan dengan paradigma pemberdayaan diperlukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Desa, Kelurahan maupun Kecamatan.

Untuk mewujudkan keberdayaan, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, di era otonomi ini perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tataran pemerintahan perlu ditambahkan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab dan demokrasi (*Good Governance*). Sedangkan pada tataran kemasyarakatan dikembangkan mekanisme yang memberikan kewenangan dan peluang partisipasi warga masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama. Salah satu kewenangan tersebut yang dimaksud adalah memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk turut serta berpartisipasi di dalam perencanaan pembangunan, sehingga terjamin adanya kesatuan usaha dan kesatuan tindakan ke arah tujuan bersama yang akan dicapai.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SP2N) menyatakan bahwa:

“Sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah”

Berangkat dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu usaha perubahan dari suatu keadaan dan kondisi yang dianggap lebih baik dengan melibatkan peran serta masyarakat dan unsur penyelenggara negara ditingkat pusat dan daerah. Dengan demikian, dalam pelaksanaan pembangunan dituntut perencanaan lebih aspiratif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut maka proses pembangunan harus didasarkan pada perencanaan yang matang dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat. Dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan dan kegagalan setiap program pembangunan. Oleh karena itu dukungan masyarakat hendaknya selalu mendapat perhatian dan selalu diusahakan dalam setiap kesempatan. Selain itu, pembangunan harus dimulai dari bawah (*bottom up*) dari tingkat desa dengan melibatkan masyarakat secara langsung kemudian secara bertingkat pada tingkat kecamatan dan kota.

Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat Desa Dangara'a maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat Desa Dangara'a, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka. Dalam konteks pembangunan, Adisasmita (2006:38) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal.

Dengan demikian, maka pembangunan yang dilakukan di Desa Dangara'a merupakan proses yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan guna mewujudkan hal yang lebih baik seiring dengan dimensi waktu. Prinsip pembangunan yang berpusat pada rakyat menegaskan masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan diharapkan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Upaya pemberdayaan masyarakat sebagai suatu strategi pengelolaan pembangunan, mempersyaratkan adanya keterlibatan langsung masyarakat dalam seluruh proses pengelolaan pembangunan, pemerintah dan seluruh institusi

pengelolaan pembangunan wajib menciptakan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan, dan terciptanya demokratisasi pengelolaan pembangunan pada tingkat masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini ditekankan pada partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan pada perencanaan pembangunan sehingga kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Seiring dengan semangat reformasi maka pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan perencanaan dan penganggaran yang diharapkan dapat melahirkan kebijakan yang partisipatif khususnya ditingkat lokal. Kebijakan-kebijakan yang dijadikan landasan dalam perencanaan dan penganggaran daerah antara lain Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa.

Selain itu, untuk peran partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka diterbitkan Surat Edaran Bersama antara Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 0259/M. PPN/I/2005/050/166/SJ tanggal 20 Januari 2005 perihal petunjuk teknis penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2005 dari tingkat desa hingga Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, untuk membangun kehidupan bernegara dengan tingkat keragaman masyarakat dan karakteristik geografis yang unik, pemerintah telah menyusun SPPN yang terpadu, menyeluruh, sistematis, yang tanggap terhadap perkembangan jaman, yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam pasal 2 dinyatakan bahwa tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah mendukung kondisi antar pelaku pembangunan. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang dan waktu antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Musyawarah perencanaan pembangunan desa merupakan forum musyawarah tahunan warga dan *stakeholder* desa untuk membahas dan menyepakati perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan pembangunan di desa dalam tahun anggaran berikutnya, dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah desa, kinerja implementasi rencana tahun berjalan serta masukkan dari nara sumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang dihadapi. Musrenbang bertujuan agar pembangunan lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa inilah unsur-unsur lembaga masyarakat, tokoh masyarakat, dan masyarakat sendiri yang mewakili unsur masyarakat di desa diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perencanaan pembangunan bagi kepentingan masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian di atas, maka partisipasi masyarakat Desa Dangara'a dalam musyawarah perencanaan pembangunan bisa dijadikan salah satu cerminan fenomena yang masih melekat di dalam masyarakat Indonesia saat ini. Saat didengung-dengungkannya partisipasi masyarakat, ternyata hal tersebut masih jauh dari keadaan yang diinginkan. Masyarakat masih saja mengalami kesenjangan dalam kaitannya dengan keberadaan mereka ketika akan memasuki area-area publik. Bila dilihat dari sisi peran, akses, manfaat, maupun kontrol.

Keterkaitan antara ketidakadilan pemerintah dan partisipasi masyarakat bisa dikatakan sangat erat. Persoalan pembedaan peran dalam lingkup ruang publik dan ruang domestik bisa dikatakan adalah faktor utama dalam hal ini kaitannya dengan minimnya partisipasi mereka dalam musrenbang. Faktor bisa yang disebabkan budaya patriarki yang sudah mengakar di lingkungan masyarakat kita bisa dijadikan analisis awal untuk menjawab mengapa partisipasi masyarakat sangat rendah khususnya dalam proses musrenbang dan umumnya dengan berbagai aktivitas dalam lingkup ruang publik yang berkaitan dengan masyarakat luas. Fenomena minimnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang dan dampak langsung dari fenomena tersebut dengan pembangunan yang akan dilakukan di daerah terkait adalah bahan yang sangat menarik untuk dikaji lebih dalam karena harapan masyarakat dengan

pelaksanaan musrenbang sangat kompleks, namun pelaksanaannya belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat khususnya masyarakat di Desa Dangara'a.

Penjelasan di atas, dibuktikan dengan hasil observasi awal yang dilakukan oleh calon peneliti bahwa partisipasi masyarakat Desa Dangara'a sangat rendah dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Faktor minimnya sosialisasi dan ketidakpedulian dari warga adalah dua hal utama yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Partisipasi yang rendah tersebut semakin diperparah dengan segala usulan-usulan masyarakat pada musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) sebelumnya tidak terlaksana dan tidak menunjukkan hasil sehingga menimbulkan kekecewaan masyarakat, selain itu masyarakat kurang paham dengan musrenbang itu sendiri serta fenomena yang terlihat juga menunjukkan keaktifan masyarakat hanya sampai pada awal seperti pra musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) saja, tahap selanjutnya masyarakat menunjukkan sikap yang kurang aktif bahkan tidak memiliki kesadaran untuk menjaga hasil pembangunan sebelumnya

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif sendiri merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang, yakni Kepala Desa Dangara'a, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun 1 orang dan tokoh masyarakat 1 orang.

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian walaupun sifatnya masih sementara, karena akan berkembang selama penelitian. Dalam penelitian ini, data-data yang dikumpulkan akan di analisis setiap waktu secara induktif selama penelitian berlangsung dengan mengolah bahan empirik. Langkah analisis data yang dilakukan secara bertahap (Miles dan Huberman dikutip Idrus, 2009:148), yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Reduksi data, dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari kegiatan pengumpulan data yang sekaligus pula merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang bertujuan menajamkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya pengambilan kesimpulan. Hal tersebut terjadi karena dengan penyajian data akan dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman tersebut. Penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi, yaitu makna-makna yang muncul dalam data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yakni merupakan validitasnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) adalah merupakan forum musyawarah tahunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Dangara'a bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyepakati rencana kerja dalam pelaksanaan pembangunan. Sebelum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dilaksanakan telah diawali dengan pelaksanaan pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) ditingkat Dusun/RT, dan merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mempersiapkan rencana usulan pembangunan yang akan dibahas pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Berdasarkan pendapat Sumodiningrat (1999:69) bahwa untuk mewujudkan keberhasilan dalam pembangunan maka diperlukan suatu strategi perencanaan dalam proses pembangunan. Perencanaan pembangunan idealnya tidak lagi diarahkan pada pola *top down* yang bersifat mobilisasi seperti yang selama ini terjadi. Perencanaan pembangunan yang partisipatif lebih mencerminkan adanya demokrasi untuk terciptanya *good governance* (pemerintahan yang baik).

Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Sumadiningrat di atas, bahwa Musrenbangdes merupakan sebuah strategi pemerintah dalam perencanaan pembangunan yang berasal dari partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan di wilayah mereka. Pemerintah tidak lagi melaksanakan pembangunan yang berpola *top down* dengan memobilisasi masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah berdasarkan partisipasi masyarakat melalui aspirasi yang diberikan dalam wadah Musrenbangdes.

Pendapat Sumadiningrat sejalan dengan yang diungkapkan oleh Subari dalam Prasetyo (2006:3) bahwa pembangunan harus menerapkan prinsip-prinsip desentralisasi, bergerak dari bawah (*bottom up*), mengikut sertakan masyarakat secara aktif (*participatory*), dilaksanakan dari dan bersama masyarakat (*from and with people*) dan koordinasi antar sektor serta kelembagaan yang ada di desa/kelurahan. Melalui proses semacam ini maka keinginan-keinginan dan kebutuhan masyarakat dapat disalurkan dan diwujudkan dalam program pembangunan.

Konsep diatas sesuai dengan tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional yaitu mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan dan menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi antara daerah, antara fungsi pembangunan pusat dan daerah serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu dalam melaksanakan pembangunan sekarang ini pemerintah melibatkan langsung masyarakat dengan cara menjaring aspirasi masyarakat dari bawah dan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam merencanakan pembangunan di daerah mereka melalui Musrenbang.

Pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah melalui Musrenbang dimulai dengan Musrenbangdes, karena dalam melakukan perencanaan pembangunan tersebut dimulai melalui pemerintah paling bawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat yaitu pemerintah kelurahan dengan mengikut sertakan masyarakat secara aktif (*participatory*) untuk menentukan prioritas pembangunan yang ada di lingkungan mereka.

Dengan partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes, perencanaan pembangunan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat, berarti dalam penyusunan rencana/program pembangunan dilakukan penentuan prioritas. Dengan demikian pelaksanaan program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien.

Musrenbang desa merupakan bagian paling bawah dalam perencanaan yang bersifat *Bottom up* dimana pada prosesnya di dahului dengan pelaksanaan musyawarah ditingkat Dusun. Dalam musyawarah ditingkat Dusun, usulan-usulan prioritas yang dihasilkan dari masukan langsung masyarakat untuk kemudian dibahas dalam Musrenbang Desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti berusaha untuk melakukan kajian tentang perencanaan partisipatif masyarakat di Desa Dangara'a dengan menggunakan teori dari Ericson yang terdiri dari partisipasi dalam tahap perencanaan, partisipasi di dalam tahap pelaksanaan dan partisipasi di dalam pemanfaatan. Berikut ini akan dijelaskan hasil penelitian tersebut, yaitu:

1. Partisipasi Dalam Tahap Perencanaan (*Idea Planing Stage*).

Pembangunan melalui partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat melalui usulan, saran dan kritik serta kehadiran masyarakat dalam musyawarah. Peningkatan keaktifan dan peran serta kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah disusun.

Partisipasi masyarakat dalam tahap penyusunan rencana dengan memberikan usulan-usulan mengenai program, keaktifan memberikan saran dan kritik serta tingkat kehadiran masyarakat dalam pertemuan terkait dengan pra musyawarah rencana pembangunan di Desa Dangara'a. Adapun

partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah dengan cara melibatkan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi, yang merujuk pada dukungan masyarakat (keterlibatan masyarakat) dalam tahap perencanaan kegiatan Pra Musrenbang, serta adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat dalam memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang telah diadakan.

Kegiatan pra musrenbang yang ada di Desa Dangara'a sangat direspon baik oleh tokoh-tokoh masyarakat, seperti adanya dukungan dan peran serta tokoh agama, tokoh pemuda dan lainnya untuk mendukung rencana pelaksanaan kegiatan pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) yang dilaksanakan. Olehnya itu, kami harapkan dengan adanya kegiatan seperti ini, bisa dipergunakan masyarakat sebagai ajang untuk berpartisipasi dan berperan serta dalam memberikan sumbangsuhnya. Jadi saya melihat bahwa peran tokoh-tokoh masyarakat sangat aktif. Dengan demikian masyarakat yang lainnya juga merasa memiliki semangat untuk berperan dan berpartisipasi

Kesimpulan awal peneliti berdasarkan pernyataan dua informan yang telah diwawancarai bahwa peran serta dan dukungan masyarakat dalam pra musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang ada di Desa Dangara'a, sangat disambut dengan baik oleh masyarakat, karena tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri ikut serta berpartisipasi dalam pra musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Dengan harapan bahwa apa yang mereka usulkan dan sepakati, dapat terealisasi dengan baik.

Seperti apa yang dikatakan Adisasmita (2006:42) bahwa partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program/proyek pembangunan, dan merupakan aktualisasi kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi pembangunan. Pandangan tersebut memberikan makna bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan rencana dan implementasi program yang didapatkan, di mana di dalamnya ada keterlibatan masyarakat. Namun kenyataan yang terlihat menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat hanya sampai pada tingkat Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang artinya bahwa masyarakat tidak ikut dalam proses perencanaan dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)

Jadi, dukungan dan peran serta yang dimaksud di sini yaitu keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) mulai dari tahap pra musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) sampai pada tahap menjaga atau pemanfaatan program yang telah dilaksanakan. Sedangkan informasi yang diperoleh peneliti terkait dengan peran masyarakat dalam pelaksanaan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang ada di Desa Dangara'a, bahwa masyarakat sangat merespon kegiatan ini, karena seluruh masyarakat berharap dengan adanya kegiatan ini, dapat memberikan harapan baru bagi masyarakat. Seluruh elemen masyarakat yang ada di Desa Dangara'a sangat mengharapkan adanya perubahan yang signifikan dari sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu, seluruh masyarakat merespon pertemuan ini dan ikut serta memberikan dukungan dan perannya masing-masing, agar apa yang menjadi keinginan kami dapat terkabul

Geddesian dalam Soemarmo (2005:26) mengemukakan bahwa pada dasarnya masyarakat dapat dilibatkan secara aktif sejak tahap awal penyusunan rencana, begitupun kaitannya dengan pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa Lembah Sumara. Keterlibatan masyarakat dapat berupa: 1) *Pendidikan melalui pelatihan*. Pendidikan melalui pelatihan untuk masyarakat di Desa Lembah Sumara belum dilakukan secara menyeluruh, pendidikan mengenai perencanaan pembangunan hanya diberikan kepada kader tertentu. Peran kader pembangunan pun tidak maksimal karena kemampuan kader dalam memahami perencanaan pembangunan yang terbatas sehingga tidak mampu mengkomunikasikan kembali kepada masyarakat secara luas. 2) *Partisipasi aktif dalam pengumpulan informasi*. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengumpulan informasi belum dilaksanakan secara menyeluruh di Desa Lembah Sumara, hanya sebagian kecil RT/RW yang melaksanakannya. 3) *Partisipasi dalam memberikan alternatif rencana dan usulan kepada pemerintah*. Dalam prakteknya, sebagian besar masyarakat memberikan alternatif rencana dan usulan kepada pemerintah, meskipun alternatif rencana

dan usulan yang disampaikan belum memenuhi sifat spesifik, terukur dan dapat dijalankan.

Pelaksanaan Pra Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Dangara'a menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan program pembangunan sudah dilakukan sesuai dengan tahapannya seperti pemberian kesempatan kepada masyarakat dalam mengeluarkan aspirasinya dengan memberikan usul-usul yang sesuai dengan kebutuhan dalam perencanaan maupun pelaksanaan Pra Musrenbang maupun pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dilaksanakan. Keterlibatan masyarakat dalam memberikan saran, masukan dan usulan diawali dari Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Pra-Musrenbang) ditingkat Dusun, yang nantinya usulan tersebut yang menjadi prioritas, dan akan dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu Musrenbang Desa.

Partisipasi masyarakat dalam Pra Musrenbang di Desa Dangara'a telah dilakukan melalui tahapan-tahapan yang telah diatur dan disepakati bersama, seperti melakukan dan memberikan usulan-usulan pada saat Pra Musrenbang karena dari hasil tersebut akan diprioritaskan program-program yang menjadi sangat penting dari masing-masing dusun. Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) ditingkat dusun ini merupakan cara atau tindakan untuk menjangkau aspirasi dari bawah (masyarakat) untuk dibuatkan prioritas dalam program pembangunan di Desa. Hal ini dilakukan karena merupakan bagian dari pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Desa.

Adapun teknis penyelenggaraan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dilakukan sesuai mekanisme yang ada seperti masyarakat ditingkat Dusun dan kelompok-kelompok masyarakat melakukan survey atau pendataan langsung ke lingkungannya masing-masing yaitu pada tingkat Dusun untuk menggali permasalahan warga dan masyarakat di tingkat Dusun dan kelompok-kelompok masyarakat melakukan musyawarah atau FGD dengan catatan masyarakat atau perwakilan membawa daftar usulan permasalahan warga ditingkat Dusun. Sedangkan berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti, bahwa di setiap Dusun yang melakukan atau melaksanakan Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sudah melakukan mekanisme yang benar. Tetapi partisipasi masyarakat tersebut hanya sebatas pada tingkat Dusun saja, karena dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Desa, masyarakat kurang aktif.

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sudah maksimal, artinya masyarakat terlibat dalam perencanaan pembangunan dengan aktif memberikan usul-usul dan ide-ide di dalam pertemuan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan terutama ditingkat Dusun karena pada saat pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Desa tingkat partisipasi masyarakat menurun. Uraian tersebut memberikan makna bahwa bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Desa Dangara'a masih rendah. Hal ini juga dimaknai bahwa partisipasi masyarakat yang rendah diakibatkan pengalaman pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sebelum-sebelumnya yang hasilnya kurang memuaskan dari harapan masyarakat. Artinya pelaksanaan program pembangunan belum sesuai dengan program-program yang diajukan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan maka disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Desa Dangara'a menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan usul-usul dan ide-ide terlihat pada saat Pra Musrenbang saja, sedangkan pada saat pelaksanaan Musrenbang Kelurahan partisipasi masyarakat masih kurang aktif. Artinya masyarakat kurang merespon pelaksanaan Musrenbang yang tidak sesuai harapan mereka.

2. Partisipasi di Dalam Tahap Pelaksanaan (*Implementation Stage*)

Partisipasi selain telah menjadi kata kunci dalam pembangunan, juga menjadi salah satu karakteristik dari penyelenggaraan pemerintah yang baik. Untuk melaksanakan program pembangunan

di daerah diperlukan dukungan partisipasi masyarakat sebagai pencerminan semangat rasa kebersamaan, dan kesediaan berkorban untuk keberhasilan pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam ruang lingkup pemerintahan merupakan berbagai bentuk keikutsertaan masyarakat sebagai warga negara dalam proses pelaksanaan pembangunan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Secara umum partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya.

Adapun yang dimaksud partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan Musrenbang pada penelitian ini yaitu keterlibatan seseorang atau masyarakat pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu kegiatan, yang merujuk pada partisipasi masyarakat dalam memberikan saran dan ide-ide yang dapat memberikan manfaat terhadap pembangunan. Serta peran serta masyarakat dalam memberikan bantuan berupa tenaga, uang dan barang/jasa.

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti tentang keterlibatan seseorang atau masyarakat dalam memberikan saran dan ide-ide yang dapat memberikan manfaat pada tahap pelaksanaan, bahwa:

Delegasi atau wakil dari masyarakat yang telah ditunjuk untuk terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan tetap memberikan saran dan masukan yang telah terjaring dari bawah, yaitu terkait dengan program yang menjadi prioritas pada saat pra musrenbang, jadi semua usulan masyarakat akan dicatat, sehingga dapat diketahui apa saja yang menjadi keinginan masyarakat. Dan tidak hanya sebatas itu, kami tetap melakukan kerjasama di lapangan pada saat pekerjaan tersebut telah dilaksanakan, sehingga kami bisa mengontrol pekerjaan yang mereka lakukan

Informasi yang diperoleh peneliti bahwa, jumlah masyarakat yang terlibat pada saat Musrenbang tahun 2024 sangat sedikit jumlahnya, tidak seperti Musrenbang sebelumnya. Berdasarkan pengalaman tersebut, bahwa rendahnya pelibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat mengakibatkan dampak negatif, seperti rendahnya rasa memiliki dari masyarakat atas program pembangunan kota yang disusun, akibatnya keberlanjutan (*sustainability*) dari program yang dilaksanakan tidak terwujud. Program yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakatnya dan munculnya biaya transaksi (*transaction cost*) yang sangat mahal karena masyarakat kurang memahami tujuan dari program pembangunan sehingga seringkali muncul penolakan atas program yang dilaksanakan.

Partisipasi masyarakat dalam memberikan saran dan kritik sudah sering dilakukan, walaupun saran dan kritikan tersebut kurang mendapat respon yang cukup baik dari pemerintah. Tetapi kami berusaha untuk tetap optimis dan berharap agar suatu saat nanti, apa yang diinginkan masyarakat dapat terealisasi, sehingga masyarakat bisa lebih peduli untuk menjaga program pembangunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa, ternyata keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan hanya selesai pada tahap perencanaan yang pada tahap itu pun masih banyak langkah-langkah yang belum terlaksana dengan baik, sehingga implementasi pola tersebut dapat dikritisi mengandung banyak kelemahan. Misalnya, partisipasi masyarakat selaku penerima manfaat sangat lemah, hasil dari berbagai forum koordinasi di tingkat lebih rendah (Desa) kadang tidak digubris oleh pemerintah yang lebih tinggi, mekanisme perencanaan mulai dari musrenbang Desa hanya bersifat mencatat daftar kebutuhan masyarakat ketimbang sebagai proses perencanaan yang partisipatif. Proses tersebut akhirnya menjadi proses birokratis yang sangat panjang dan lama, sehingga masyarakat tidak mendapat kepastian kapan kebutuhannya akan terwujud.

Salah faktor yang menyebabkan sehingga pelaksanaan musyawarah pelaksanaan pembangunan kurang direspon oleh tokoh-tokoh masyarakat, karena aspirasi yang mereka sampaikan pada saat pra musyawarah perencanaan pembangunan dilaksanakan sebagian besar tidak terealisasi, dan ini bukan pertama kalinya usulan tersebut tidak terealisasikan. Maka tidaklah salah kalau masyarakat beranggapan bawa partisipasi memang telah lama menjadi penghias bibir para pejabat dari tingkat

pusat sampai tingkat desa bahwa pembangunan dan kelestarian hasil pembangunan tidak akan berhasil bila tidak didukung dengan “partisipasi masyarakat”. Namun konsep partisipasi masyarakat yang digunakan oleh para pejabat jauh berbeda dengan konsep partisipasi yang sebenarnya. Partisipasi masyarakat menurut pejabat hanya ditekankan dalam hal pembayaran pajak, pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, penerapan teknologi yang diperkenalkan atau mengkonsumsi produk dalam negeri serta kontribusi materi yang berupa tanah, batu, semen, dan lain-lain.

Menurut peneliti bahwa rendahnya partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang di Desa Dangara’a tahun 2024, karena tidak adanya keseriusan pemerintah untuk memberikan bantuan yang telah tertulis dalam kesepakatan bersama. Sehingga masyarakat cenderung apatis terhadap pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan. Selain itu adanya kecenderungan tingkat kehadiran stakeholders penting dalam perencanaan pembangunan seperti kader pembangunan, tokoh adat, dan tokoh pemuda relatif rendah, serta tingkat keaktifan peserta relatif rendah. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh salah seorang peserta yang pernah mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan bahwa kehadiran peserta dalam musyawarah perencanaan pembangunan tersebut semata-mata hanya memenuhi undangan saja, sehingga kehadirannya lebih banyak sebagai pendengar.

Selain itu, ada beberapa tokoh masyarakat yang diundang pada saat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan tidak bisa hadir dan mewakilkannya pada orang lain yang kurang memahami perencanaan pembangunan. Sehingga mereka tidak mengajukan usulan, tidak memberikan masukan dan juga tidak mengidentifikasi kebutuhan dalam perencanaan. Mereka terkesan menyerahkan sepenuhnya kepada Kepala Dusun serta rekan-rekan lainnya untuk merumuskan perencanaan pembangunan. Termasuk waktu bagi penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan sangat pendek, sehingga sulit untuk mendorong partisipasi masyarakat. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti, tentang peran serta masyarakat dalam memberikan bantuan berupa tenaga dan uang

Masyarakat tidak akan dibebankan untuk memberikan tenaganya ataupun materi, tetapi seingat saya, masyarakat pernah mengumpulkan uang untuk membeli material (pasir dan kerikil) dan semen pada saat jembatan tersebut akan direhab. Karena selama ini jembatan tersebut tidak cukup kuat untuk menahan beban kendaraan yang melintas

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti, bahwa salah satu alasan sehingga masyarakat mengumpulkan uang untuk membeli bahan materila pasir dan semen, karena masyarakat berpendapat bahwa campuran yang digunakan untuk pembuatan jembatan tidak cukup kuat untuk menahan beban kendaraan yang setiap saat melintas, sehingga masyarakat berinisiatif untuk memberikan bantuan berupa pasir dan semen untuk digunakan, agar konstruksi pembuatan jembatan tersebut bisa lebih kuat dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, bahwa keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Dangara’a, dalam hal tenaga dan materi, dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat antusias untuk melibatkan diri karena pelaksanaan pembangunan yang dijalankan telah dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait dengan program prioritas dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

3. Partisipasi di Dalam Pemanfaatan (*utilitazion stage*)

Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dan pemanfaatan pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka.

Adapun partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan dalam penelitian ini adalah tentang keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan suatu proyek yang telah selesai dikerjakan, dengan merujuk pada peran serta masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana yang

telah selesai dikerjakan, serta kepedulian masyarakat untuk mempergunakan sesuai dengan manfaatnya untuk kepentingan bersama. Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait dengan peran serta masyarakat dalam menjaga dan memelihara infrastruktur yang telah selesai dikerjakan.

Seharusnya masyarakat ikut serta untuk menjaga infrastruktur yang telah dibangun, karena mereka juga memberikan bantuannya pada saat proyek tersebut dilaksanakan, tetapi yang saya ketahui selama ini bahwa inisiatif masyarakat untuk memelihara infrastruktur masih sangat rendah, sehingga menyebabkan daya tahan infrastruktur itu sendiri tidak tahan lama dan mudah rusak

Menurut peneliti bahwa, dengan adanya proses pelibatan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan, akan muncul suatu sistem evaluasi dari kegiatan penataan program pembangunan yang telah dilakukan dan menjadi masukan bagi proses pembangunan selanjutnya. Dengan pendekatan partisipasi masyarakat diharapkan terciptanya kesepakatan dan aturan main di masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial disebabkan program pembangunan yang disusun sesuai dengan aspirasinya. Selain itu juga meningkatkan rasa memiliki masyarakat (*sense of belonging*) terhadap program pemanfaatan yang sejalan dengan terakomodasinya aspirasi mereka dalam program pembangunan tersebut, yang pada akhirnya dapat terwujud pembangunan yang efisien dan efektif.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Dangara'a dalam tahap pemanfaatan hasil pembangunan menunjukkan bahwa, sikap masyarakat dalam menjaga hasil pembangunan masih sangat rendah. Sedangkan berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan menjaga infrastruktur/program hasil pembangunan masih belum menunjukkan sikap yang serius. Ini juga dibuktikan dengan informasi yang diperoleh peneliti dengan salah seorang masyarakat, yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat untuk menjaga program pembangunan masih sangat jauh dari harapan. Ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat untuk merawat serta menjaga program pembangunan masih sangat rendah.

Hprogram pembangunan belum sepenuhnya dilakukan masyarakat, seperti saluran air dan gerobak sampah, nampak sudah mulai terlihat rusak, karena kurangnya perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan masyarakat. Untuk mendapatkan hasil perencanaan pembangunan daerah yang baik, tepat waktu, tepat sasaran berdaya guna dan berhasil guna, dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, karena masyarakat sebagai salah satu unsur dalam pembangunan, tentunya dapat mengetahui sekaligus memahami apa yang ada di wilayahnya, disamping itu dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada masyarakatnya, sehingga mereka dapat merasa ikut bertanggung jawab dan merasa memiliki program-program pembangunan yang jelas akan sangat menguntungkan bagi pelaksanaannya.

Kurangnya partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan infrastruktur dengan baik sehingga menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh bahwa kecenderungan masyarakat yang selalu membuang sampah disembarang tempat yang biasa menyebabkan saluran air menjadi tersumbat dan akhirnya menyebabkan genangan air. Sementara itu menurut Sanoff (2000:9), tujuan utama partisipasi adalah: 1) Untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan desain keputusan; 2) Untuk melengkapi masyarakat dengan suatu suara dalam membuat desain keputusan untuk memperbaiki rencana; dan 3) untuk mempromosikan masyarakat dengan membawanya bersama sebagai bagian dari tujuan umum.

Dengan partisipasi, masyarakat secara aktif bergabung dalam proses pembangunan, lingkungan fisik yang lebih baik, semangat publik yang lebih besar, dan lebih puas hati. Partisipasi mengandung pengertian lebih dari sekedar peran serta. Partisipasi memiliki peran yang lebih aktif dan mengandung unsur kesetaraan dan kedaulatan dari para pelaku partisipasi. Sedangkan peran serta bisa diartikan sebagai pelengkap dan tidak harus kesetaraan. Rendahnya partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk menjaga program pembangunan membuat hasil pekerjaan tersebut akan mudah rusak. Selain itu, banyaknya masyarakat yang menggunakan bantuan pemerintah tersebut tidak sesuai dengan fungsinya, seperti gerobak sampah yang digunakan masyarakat untuk mengangkut batu dan pasir.

Terdapat tiga buah unsur penting dalam partisipasi yaitu partisipasi merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah. Ketersediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok, ini berarti terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok dan dalam partisipasi harus ada tanggung jawab, unsur tanggung jawab ini merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota. Dari uraian di atas jelaslah bahwa partisipasi menyangkut keterlibatan diri/ego dan tidak semata-mata keterlibatan fisik dalam pekerjaan atau tugas saja, dan ketiga unsur partisipasi tersebut di dalam realitanya tidak akan terpisahkan satu sama lain, tetapi akan saling menunjang. Dalam realitasnya, terutama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, istilah partisipasi ini sering dikaitkan dengan usaha di dalam mendukung program pembangunan. Dibutuhkannya suatu kesungguhan untuk menjaga program hasil pembangunan agar dapat dipergunakan sebaik mungkin. Santosa dan Heroepoetri (2005:5) merangkum manfaat dari partisipasi masyarakat yaitu sebagai berikut: 1). Menuju masyarakat yang lebih bertanggung jawab; 2). Meningkatkan proses belajar; 3). Mengeliminir perasaan terasing; 4).Menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah; 5). Menciptakan kesadaran politik; 6). Keputusan dari hasil partisipasi mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat; 7).Menjadi sumber dari informasi yang berguna, serta; 8). Merupakan komitmen sistem demokrasi.

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan terkait dengan partisipasi masyarakat dalam hal pemanfaatan hasil pembangunan yang dilihat dari pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan disimpulkan belum menunjukkan hasil yang belum maksimal, karena masih terdapat kelompok masyarakat yang kurang memiliki kesadaran dalam menjaga dan memelihara hasil pembangunan meskipun hasil pembangunan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat umum, namun adanya sikap yang kurang sadar tersebut akan menghambat jalannya proses pembangunan khususnya di Desa Dangara'a.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat yang ada di Desa Dangara'a masih sangat rendah, khususnya pada tahap musrenbang desa. Adapun faktor yang menyebabkan sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, yaitu usulan-usulan, saran, dan masukan yang disampaikan masyarakat jarang sekali terealisasi, sehingga nampak pada tahap pelaksanaan pembangunan, banyak yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak menunjukkan hasil sehingga menimbulkan kekecewaan masyarakat. Selain itu, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga infrastruktur yang sudah ada, karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya memelihara infrastruktur/program hasil pembangunan. Disisi lain, masyarakat belum memiliki kesadaran untuk menggunakan program hasil pembangunan sebagaimana mestinya, sesuai dengan manfaat dan kegunaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, B. (2000). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bratakusuma R. Deddy Supriady. (2003). *Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Davis, K. (2000). *Perilaku Dalam Organisasi*, Edisi ketujuh. Jakarta: Erlangga.
- Djarmiko. (2005). *Perilaku Organisasi*. Alfabeta. Bandung.
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta. Erlangga.
- Mikkelsen, B. (1999). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Ndraha. T. (1990). *Pembangunan Masyarakat*. PT. Rineka Cipt. Jakarta.

- Nikmatullah, D. (1991). *Partisipasi Pemimpin Desa dalam Pembinaan Kelompok Tani di Rawa Srigi. Lampung Selatan*: Badan Penelitian Universitas Gajah Mada.
- Purnomo, A. N. (2005). *Partisipasi Masyarakat Perdesaan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Rahardjo, A. (2006). *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Riyadi dan Supriyadi B. Deddy. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah; Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. PT. Gramedia, Jakarta.
- Rukminto, A.I. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Fisip. UI Press. Jakarta.
- Saiful, A. (2002). *Menolak Pembangunanisme*. Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Salim, E. (1989). *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*. Inti Idayu Press, Jakarta.
- Siagian, S. P. (2000). *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi dan Strateginya*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Slamet Y. (1994). *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Soekanto, S. (2003). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PTRaja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soetrisno, L. (2000). *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soeyanto. (1991). *Menganal Masyarakat Desa, Suatu Pendekatan Sosiologi*. Universitas Gadjah Mada FISIP, Yogyakarta.
- Sumaryadi, I. N. (2005). *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Surat Edaran Bersama antara Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 0259/M. PPN/I/2005/050/166/SJ tanggal 20 Januari 2005
- Susanto Hari dan Asep S. 2000. *Pembangunan Berbasis Pemberdayaan (Kasus Kalimantan Barat)*. PT. Sarbi Moerhani Lestari, Bogor.
- Tjokroamidjojo, B. (2001). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gunung Agung. Jakarta.
- Tjokroamidjojo, B. (1996). *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
- Yuwono, T. (2001). *Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru*. Semarang : Ciyapps Diponegoro Universiti.